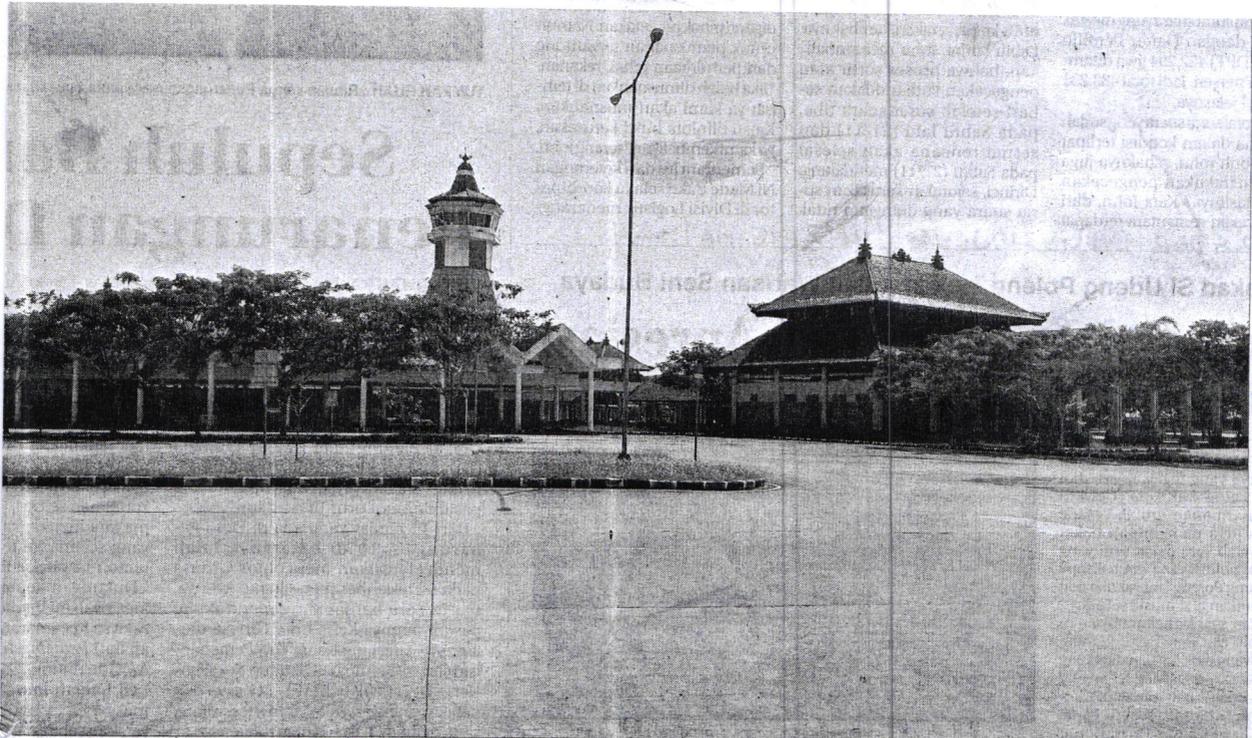




Kadishubkominfo Badung Desak Petugas

Pungli Dilaporkan



MELOMPONG: Suasana Terminal Mengwitani, Mengwi, sepi penumpang, kemarin (23/11). Ada pihak yang menuding petugas melakukan pungli di terminal ini.

MENGWI - Sepinya Terminal Mengwi, membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya. Pasalnya, setelah lebih dari 3 tahun beroperasi, terminal tersebut tidak terlihat adanya tanda-tanda beroperasi dengan maksimal. Parahnya, hal tersebut ditambah dengan maraknya kasus

permainan antara petugas terminal dengan sopir bus karena seharusnya bus-bus yang berasal dari Pulau Jawa harus diturunkan di Terminal Mengwi. Ketika akan dikonfirmasi mengenai masalah tersebut pada Senin kemarin (23/11), Kepala Terminal Mengwi I Gusti

Bagus Murdiasa enggan berkomentar. Kepala Dishubkominfo Badung I Wayan Weda Dharmajaya menjelaskan, saat ini tidak ada hal seperti itu (pungli, Red). "Kalau ada aparat kami melakukan hal seperti itu, laporkan dan saya akan tindak tegas," tegasnya.

Dharmajaya menambahkan, beberapa bus KPS (Kartu Pengawasan Supir)-nya sampai di Terminal Ubung. "Tidak bisa kami turunkan di sini (Terminal Mengwi, Red) kalau KPS-nya ke Ubung, kami tidak bisa memaksa, justru malah kami yang melanggar," imbuhnya. (lit/djo)

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 24



LIPI Usulkan Tim Khusus

Upaya Cari Solusi Pro dan Kontra Reklamasi Teluk Benoa

DENPASAR - Masih adanya pro dan kontra atas rencana reklamasi Teluk Benoa, Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyو mengusulkan untuk dibuatkan tim khusus.

Penegasan Kikiek Hardoyo-sapaan Hermawan Sulistyو ini-- sebagaimana disampaikan sesuai acara Seminar dan FGD Pengelolaan

Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal, kemarin (23/11).

Dikatakan, meski secara spesifik, Kikiek mengaku tidak terlalu mengikuti perkembangan, namun ia mengakui bahwa isu *Reklamasi Teluk Benoa* mer-

upakan isu seksi yang masih menjadi polemik di Bali. "Kami di pusat tidak terlalu mengikuti perkembangan tentang



DIDIK DWI PRAPTONO/RADAR BALI

Hermawan Sulistyو

Bentuk tim khusus. Isi atau anggota tim adalah orang-orang yang tidak memiliki kepentingan apapun soal reklamasi."

HERMAWAN SULISTYO

Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik LIPI

reklamasi (Teluk Benoa, Red), akan tetapi isu ini memang isu seksi di Bali," tegasnya. Hanya saja, lanjut pria kelahiran Ngawi, 4 Juli 1957, ini, mendapat julukan sebagai profesor "provokator" di kalangan aktivis 98 ini, munculnya polemik dan pro kontra tentang reklamasi Teluk Benoa ini lebih karena adanya kental kepentingan politik dan uang. "Masalahnya ada dua, yakni kepentingan politik dan kedua soal *kepeng* (uang, Red)," tambahnya. Sehingga, kata Kikiek, untuk bisa mengurai persoalan itu, ia mengusulkan agar dibentuk tim khusus. "Bentuk tim

khusus. Isi atau anggota tim adalah orang-orang yang tidak memiliki kepentingan apapun soal reklamasi," harappnya.

Sementara itu, masih soal reklamasi, Asisten Operasi Kapolri Ijen Pol Arief Wachjunadi lebih memilih untuk mengembalikan kepada aturan yang ada. "Kami Polri selaku pemerintah, normatif sajalah. Kembalikan pada proses dan aturan yang ada, dan kemudian dikelola semuanya. Jika tidak, maka akan muncul potensi gangguan bahkan juga gangguan nyata. Pada intinya, kami akan akomodir semuanya baik dari pro maupun kontra," pungkaskan mantan Kapolda Bali ini. (pra/djo)

Edisi : Sdasa, 24 November 2015

Hal : 24



Radar Bali

PMA Ilegal di Bali Capai Rp 103 Triliun

DENPASAR - Pesatnya perkembangan industri pariwisata dan stabilnya pertumbuhan ekonomi di Bali sejak beberapa tahun terakhir ini tidak saja membawa dampak pada tetap stabilnya pertumbuhan ekonomi di Bali

► Baca PMA... Hal 31

• PMA Ilegal • di Pulau Dewata

- Hingga akhir 2015, modal asing yang ilegal di Bali mencapai Rp 103 triliun.
- Sebagian besar modal asing terselubung tersebut diinvestasikan dalam sektor akomodasi wisata, seperti vila dan hotel kelas melati. Properti yang dibangun kemudian disewakan dan pajaknya tidak masuk negara.
- Semua itu diatasnamakan atau undername. Praktik seperti itu dilakukan, karena aturan PMA sangat ketat seperti melarang investasi hotel kelas melati, sehingga investor individu memiliki cara lebih cepat.
- Selain WNA bekerja sama dengan warga lokal, banyak juga memutuskan menikah dengan WNI untuk memuluskan usahanya.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Aturan Ketat, Pakai Atasnama

■ PMA...

Sambungan dari hal 21

Namun, juga membawa dampak pada jumlah investasi bodong milik warga negara asing di Bali.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali Panudiana Kuhn hingga akhir tahun 2015 ini, total nilai investasi PMA ilegal di Bali mencapai Rp 103 triliun. Sebagian besar modal asing terselubung tersebut diinvestasikan dalam sektor akomodasi wisata, seperti vila dan hotel kelas melati. Dia menjelaskan properti yang dibangun kemudian disewakan dan pajaknya tidak masuk negara.

"Semua itu diatasnamakan atau *undername*. Sebenarnya salah, tetapi memang rule untuk modal asing di lapangan ribet dan tidak mudah," jelasnya.

Praktik seperti itu dilakukan, karena aturan PMA sangat ketat seperti melarang investasi hotel kelas melati, sehingga investor individu

memiliki cara lebih cepat. Dia menyatakan modus *nomine* dikatakannya menyalahi aturan yang berlaku, tetapi pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena praktik semacam itu sudah terjadi sejak lama.

"Selain WNA bekerja sama dengan warga lokal, banyak juga memutuskan menikah dengan WNI untuk memuluskan usahanya," lanjutnya.

Karena kondisi tersebut, Panudiana mendesak pemerintah memperlunak aturan dengan mengizinkan warga lokal mendapatkan modal asing sehingga dapat dikenai pajak. Pasalnya, modal terselubung tersebut selama ini bebas dari tanggung jawab pajak, karena tidak terlacak oleh petugas.

Selain itu pemerintah juga diminta untuk segera mendata WNA yang memiliki usaha di Bali dan kemudian izinnya dipermudah agar dapat dikenakan pajak. "Sehingga pemerintah tidak lagi kecolongan pajak," tambahnya. (gek/yes)

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 21